

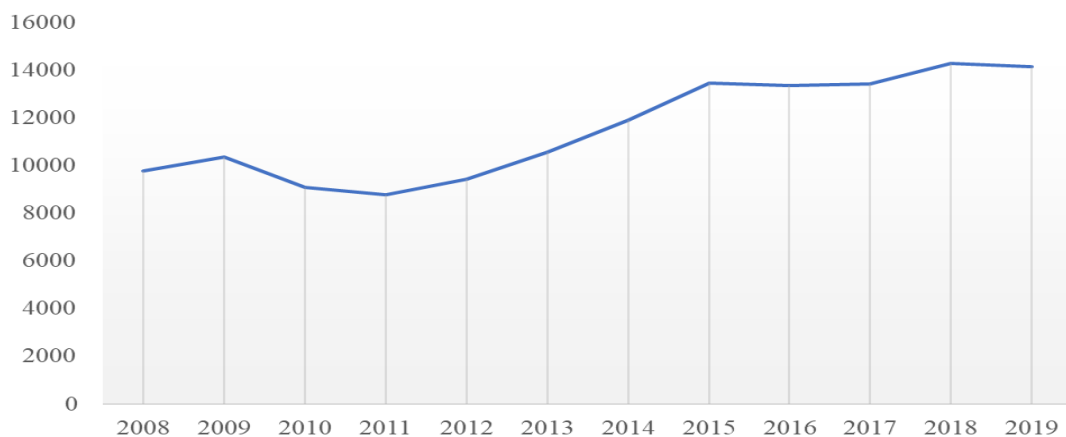
# 1 PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Peranan nilai tukar mata uang bagi suatu negara merupakan hal yang sangat penting. Hal tersebut mendorong dilakukannya berbagai upaya untuk menjaga posisi nilai tukar mata uang suatu negara agar berada dalam keadaan yang relatif stabil. Stabilitas nilai tukar mata uang juga dipengaruhi oleh sistem nilai tukar yang dianut oleh suatu negara. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dengan perekonomian terbuka memungkinkan penduduknya untuk memiliki akses secara penuh dalam perekonomian dunia.

Globalisasi dalam bidang ekonomi menyebabkan berkembangnya sistem perekonomian ke arah perekonomian terbuka antar negara. Perkembangan ekonomi internasional yang semakin pesat dapat memacu perubahan indikator makro suatu negara. Perkembangan ini menyebabkan adanya perdagangan internasional. Di dalam perdagangan internasional terdapat perbedaan mata uang yang digunakan untuk melakukan transaksi. Perbedaan mata uang ini merupakan salah satu indikator makro ekonomi. Sehubungan dengan itu, maka diperlukan adanya satuan mata uang yang sama sehingga mata uang kedua negara dapat dikonversikan ke dalam mata uanglain dengan menggunakan satuan ukuran nilai tukar mata uang yang disebut kurs (*exchange rate*) (Nurul *et al.* 2015).

Perekonomian terbuka yang dilakukan suatu negara dapat digambarkan dengan adanya kegiatan ekspor dan impor. Indonesia sebagai negara dengan perekonomian terbuka telah mengalami beberapa pergantian sistem nilai tukar. Sejak Agustus 1997 Indonesia menerapkan sistem nilai tukar mengambang bebas (*free floating exchange rate system*) yaitu posisi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (USD) ditentukan oleh mekanisme pasar. Semenjak pemberlakuan sistem nilai tukar mengambang bebas (*free floating exchange rate system*) nilai tukar mengalami keterpurukan akibat krisis moneter yang mengakibatkan jatuhnya nilai mata uang domestik secara tajam.



Sumber : [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

Gambar 1 Perkembangan laju nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat dari tahun 2008 – 2019 (dalam rupiah)

Pada Gambar 1 terlihat bahwa nilai tukar rupiah mengalami pergerakan yang berfluktuatif setiap tahunnya. Selama 12 tahun terakhir, sejak tahun 2008 hingga 2019, rata-rata nilai tukar berada pada Rp12.000 per USD. Namun pada tahun 2008 ketika terjadi krisis ekonomi global yang awalnya disebabkan oleh krisis ekonomi Amerika Serikat yang mempengaruhi negara-negara lain di seluruh dunia termasuk Indonesia yang terkena imbasnya. Menurunnya nilai tukar rupiah belakangan ini mendorong Bank Indonesia (BI) mewajibkan masyarakat untuk menggunakan mata uang rupiah dalam setiap transaksi di Indonesia. Sebagaimana dicantumkan dalam peraturan BI No. 17/3/PBI/2015, yang diyakini penggunaan rupiah dalam setiap transaksi bisa menjadi kunci untuk mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar rupiah. Hal itulah yang mendorong BI sejak 1 April 2015 menetapkan bahwa seluruh transaksi harus menggunakan rupiah. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/3/PBI/2015 tentang penggunaan mata uang rupiah, di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang diatur bahwa rupiah menjadi alat pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam transaksi keuangan di dalam negeri. Sedangkan latar belakang dikeluarkannya PBI adalah untuk memastikan penggunaan rupiah dalam setiap transaksi yang terjadi di Indonesia. Namun, ketentuan dalam Undang-Undang tersebut masih dimungkinkan pengecualian dalam penggunaannya.

Dalam lingkup bisnis, masih banyak transaksi yang masih menggunakan mata uang asing, mengingat terjadinya aktivitas yang melibatkan hubungan antar negara yang berbeda seperti ekspor-impor atau kerjasama strategis seperti investasi dimana sulit untuk dihindari transaksi menggunakan mata uang asing. Hal-hal tersebut berpotensi membuat kondisi rupiah melemah. Dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia di atas, mengatur tentang transaksi yang harus menggunakan rupiah yaitu transaksi yang tujuannya untuk pembayaran, penyelesaian kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, maupun transaksi keuangan lainnya. Semua itu diperjelas secara eksplisit bahwa setiap transaksi yang harus menggunakan rupiah adalah dalam bentuk tunai maupun *non-tunai*.

Pergerakan nilai tukar rupiah baik pelemahan ataupun penguatan, tentu saja tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia. Terdapat banyak faktor yang bisa mempengaruhi penguatan nilai tukar mata uang suatu negara yang harus dikaji, dan penelitian itu bermaksud untuk membahas lebih dalam mengenai faktor-faktor yang dinilai mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah. Selain itu perlu juga dikaji dari sisi pelaku usaha (dunia bisnis) apakah dengan adanya PBI tersebut, menghambat aktivitas transaksi atau hubungan bisnis dengan mitra usaha di luar negeri atau tidak.

Selama ini, upaya pemerintah dalam menjaga kestabilan pergerakan nilai tukar rupiah tidaklah mudah, karena berkaitan dengan cadangan devisa yang juga terbatas. Dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 adalah satu upaya yang perlu diapresiasi untuk menjaga nilai rupiah. Berdasarkan hal tersebut perlu dikaji seberapa besar efektivitas kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Bank Indonesia tersebut terhadap pergerakan nilai tukar rupiah, terutama yang diharapkan adalah dapat menstimulus penguatan nilai tukar rupiah.

Juyhmbn

## Perumusan Masalah

Dengan diimplementasikannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015, sudah tentu akan berdampak pada dunia usaha. Banyak perusahaan yang sebelumnya terbiasa menggunakan mata uang asing seperti dollar Amerika Serikat untuk bertransaksi, harus menyasati cara lain agar dapat tetap melakukan transaksi tanpa melanggar kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, namun juga tetap menjaga hubungan baik dengan para mitranya. Berbagai kontrak kerjasama pun harus ikut menyesuaikan dengan PBI tersebut, dimana ketika objek transaksi atau *underlying* transaksi terdapat di dalam negeri, maka transaksi harus dilakukan dengan menggunakan mata uang rupiah. Harapannya, hal ini dapat secara efektif menstimulus pergerakan nilai tukar rupiah sehingga terjadi penguatan terhadap mata uang dollar Amerika Serikat, atau setidaknya paling minimum adalah pergerakan nilai tukar menjadi lebih stabil.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan tiga permasalahan an ini dengan mengajukan sejumlah pertanyaan berikut ini :

1. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat?
2. Apakah kebijakan pemberlakuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 dapat berpengaruh terhadap pergerakan nilai tukar rupiah ?
3. Bagaimana kondisi pergerakan nilai tukar rupiah jika terjadi guncangan pada variabel yang mempengaruhinya?

### Tujuan Penelitian

Berdasarkan fenomena dan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika.
2. Menganalisis pengaruh kebijakan PBI 17/3 tahun 2015 terhadap pergerakan nilai tukar rupiah.
3. Menganalisis perilaku pergerakan nilai tukar rupiah terhadap guncangan pada variabel-variabel yang mempengaruhinya.



Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

1. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah mengevaluasi kebijakan terkait efektivitas peraturan tersebut.
2. Bagi penulis, penelitian ini dimaksudkan untuk memperkaya wawasan manajerial dan bisnis praktis, melatih kemampuan aplikasi teori dan konsep - konsep manajerial, serta melatih kemampuan analisis terstruktur.
3. Bagi pembaca sebagai informasi baru dan bagi penulis lain sebagai referensi serta studi perbandingan untuk penulisan selanjutnya.

## Ruang Lingkup Penelitian

Fokus penelitian ini pada kondisi makro Indonesia sebelum maupun sesudah penerapan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah NKRI dengan menggunakan data bulanan dari tahun 2008 hingga 2019.

## 2 TINJAUAN PUSTAKA

### Landasan Teori Nilai Tukar

Teori nilai tukar terus berkembang sejak sistem *Bretton Woods* tidak lagi diadopsi untuk mengatur pencetakan mata uangnya. Kondisi tersebut menyebabkan nilai tukar antar mata uang akan sangat bergantung pada permintaan dan penawaran (*demand and supply*) mata uang dimaksud. Teori yang melandasi pergerakan nilai tukar dapat dibagi menjadi tiga besaran pendekatan, yaitu: pendekatan fundamental, pendekatan teknikal, dan pendekatan mikrostruktur. Meskipun mengalami banyak perdebatan atas pendekatan mikrostruktur, namun pendekatan tersebut ternyata memiliki kemampuan menjelaskan fenomena dinamika nilai tukar yang tidak bisa dijelaskan dengan baik oleh pendekatan konvensional fundamental maupun teknikal.

Semakin terintegrasinya perekonomian domestik dengan perekonomian global serta derasnya aliran masuk modal asing meningkatkan kompleksitas manajemen makroekonomi, khususnya kebijakan moneter dan nilai tukar. Penguatan pengelolaan dinamika arus modal dan nilai tukar dilakukan dengan beberapa prinsip dasar sebagai berikut: Pertama, koordinasi penerapan bauran instrumen kebijakan menjadi bagian strategi yang penting dalam menerapkan possible trinity yang optimal. Kedua, di sisi aliran modal, dengan tetap menganut rezim devisa bebas, langkah-langkah makroprudensial di bidang arus modal merupakan opsi kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi arus modal jangka pendek yang berlebihan. Memberikan ruang/kemungkinan nilai tukar untuk menguat, akumulasi cadangan devisa dan penggunaan kebijakan moneter dan fiskal lainnya. Senantiasa mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang bersifat prudensial dan struktural untuk mengelola aliran modal masuk. Ketiga, di sisi nilai tukar, menghadapi arus modal, nilai tukar dikelola untuk tetap fleksibel dan memberi ruang gerak untuk terapresiasi, namun tetap dijaga agar jangan sampai terlalu melenceng jauh dari nilai tukar fundamentalnya (*overvalued*). Pengelolaan nilai tukar yang sejalan dengan kondisi fundamental dilakukan melalui intervensi di pasar valas secara simetris, yang memberikan ruang gerak apresiatif dalam hal terjadi aliran modal asing yang tinggi. Di sisi kebijakan moneter, kompleksitas kebijakan moneter melalui suku bunga sebagian dapat teratasi dengan menerapkan kebijakan makroprudensial. Keempat, kebijakan moneter didukung oleh kebijakan makroprudensial yang bertujuan meminimalisir dampak aliran modal masuk pada asset price bubble dan pertumbuhan kredit yang berlebihan yang dapat menimbulkan risiko kestabilan moneter dan kestabilan sistem keuangan, termasuk kebijakan capital flow management (CFM).